

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Bustami Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Celina Tri siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008.
- Indroharto, *Azas-Azas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen DI Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Negosisasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrasi)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010.
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan (Hak Dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Marianus Gaharpung, *Perlindungan Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika, Vol.III, No. 1, Juli 2000.
- Munir fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007.
- Otje Salman dkk, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-7, Jakarta, Grafindo Persada, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Pers, 1996.
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional)*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : Pengumuman Nomor Peng-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

C. Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

<http://kamusbahasaindonesia.org/wewenang>.

<http://www.bmppvi.com/layanan/>.

Johannes Gunawan, "*Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLN Sebagai Lembaga Pelayanan Umum*", Pro Justitia, Jurnal Hukum Triwulan Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 19, Nomor 4, Oktober 2001.

Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dengan Universitas Katolik Parahayangan Fakultas Hukum, *Bimbingan Teknis Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Bandung, 2018.

Mairul dan Kartika Dewi Irianto, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS))*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat, Pagaruyuang Law Jurnal, Volume 1 No. 2, Januari 2018. Hlm 272.

Modul Workshop Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Modul Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan *Online Dispute Resolution* (ODR), Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan 2017, Cetakan ke-1, September 2017. Hlm 28.

Wetria Fauzi, *The Authority Of The Financial Services Authority (OJK) In Publishing Insurance Regulation In The Perspective Of Insurance Law In Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 2 (2017): 211-224, 6 Juni 2017, hlm 221.